

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Laporan Tahunan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDMD selama satu tahun dan merupakan tahun terakhir Renstra tahun 2024 – 2026. Di mana laporan tahunan digunakan untuk melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu serta berbagai permasalahan yang dihadapi agar dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Penyusunan Laporan Tahunan ini membahas seluruh capaian kinerja pada RPD ,RENSTRA dan Renja pada BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2024.

Diharapkan dengan disusunnya laporan tahunan ini secara rutin setiap tahunnya, setiap bidang dan sekretariat yang ada di lingkungan BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB dapat melihat progres dan perkembangan kegiatannya untuk menjadi bahan evaluasi serta perbaikan kinerjanya dimasa mendatang. Tantangan dan hambatan dalam tugas setiap tahun terus mengalami dinamika, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan dan dinamika tersebut menuntut agar Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB dapat mengantisipasinya dan menyesuaikan diri sehingga tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Laporan Tahunan ini tersusun berkat kerjasama yang baik dengan seluruh pejabat dan staf di lingkungan BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB, sehingga kepadanya disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Selanjutnya terhadap berbagai kekurangan yang ada dalam penyajian laporan ini dapat disampaikan kritik, saran dan masukan untuk penyempurnaannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Mataram, Januari 2025

Kepala BPSDMD

Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. ASHARI, SH., MH.

NIP. 19661231 198603 1 105

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sistematika Penulisan	2
BAB II GAMBARAN UMUM BPSDMD PROVINSI NTB	5
2.1 Tugas Dan Fungsi	5
2.2 Potensi Dan Kondisi Eksisting Bpsdm Daerah Provinsi NTB	6
2.3 Susunan Organisasi	8
2.4 Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (Tahun 2023)	11
BAB III ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	20
3.1 Isu Strategis Bpsdm Daerah Provinsi NTB.....	20
3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BPSDMD Provini NTB.....	23
BAB IV PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	30
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah Dalam RPD.....	30
4.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	33
4.3 Rencana Kerja Serta Target dan Pendanaannya	33
BAB V CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	53
5.1 Capaian Kinerja RPD.....	54
5.2 Capaian Kinerja RENSTRA	55
5.3 Capaian Kinerja Renja OPD	56
5.4 Capaian Kinerja Program Unggulan	67
5.5 Permasalahan Dan Kendala	73
5.6 Saran Dan Tindak Lanjut	75
BAB VI PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM...	76
BAB VII CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN	77
BAB VIII CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	78
BAB IX PENUTUP	79

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Lampiran I.1

- FORMULIR E.54.2 (Evaluasi Terhadap Hasil Renstra BPSDM DAERAH Provinsi NTB PERIODE 2024 – 2026) - Nomenklatur Permendagri No 90 Tahun 2019

Laporan Lampiran I.2

- FORMULIR E.54.3 (Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan IV BPSDM DAERAH Provinsi NTB Tahun 2024)

Lampiran Laporan I.3

- FORMULIR E.54.4 (Capaian Pelaksanaan Program Prioritas Pelaksanaan Urusan Tahun 2024)

Lampiran Laporan I.4

- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi (DAK) Tahun 2024

Lampiran Laporan I.5

- Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCAT) Tahun 2024

Lampiran Laporan I.6

- Laporan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024

Lampiran Laporan I.7.....

- Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Peraturan Gubernur NTB Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RESNTRA PD) Tahun 2024-2026, dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi NTB Tahun 2024, maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut setiap akhir tahun anggaran, Perangkat Daerah perlu menyusun Laporan Tahunan Perangkat Daerah dengan memperhatikan paragraf 3 pasal 259 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan tahunan merupakan bahan evaluasi tingkat capaian kinerja terhadap target tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan tingkat capaian kinerja terhadap target akhir pada Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 – 2026.

Laporan Tahunan BPSDM Daerah Provinsi NTB ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPSDM Daerah Provinsi NTB sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat Pengembangan Kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Aparat Sipil Negara dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ,Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa BPSDM Daerah Provinsi NTB menjalankan Fungsi Penunjang Pemerintah bidang Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karena itu dari tusi tersebut BPSDM Daerah Provinsi NTB mengambil tujuan pada RPD 2024 – 2026 yaitu Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan tujuan pada Perangkat Daerah yaitu Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut BPSDM Daerah Provinsi NTB mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki kemampuan dasar/manajerial melalui pelatihan Pengembangan Kompetensi latsar CPNS Pengembangan Kompetensi struktural kepemimpinan,diklat fungsional, teknis

workshop/seminar, lokakarya/sejenisnya dan uji sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran secara singkat tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun anggaran 2023 dalam rangka merealisasikan tujuan BPSDM Daerah Provinsi NTB yaitu Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi, serta untuk laporan pertanggungjawaban bagi BPSDM Daerah Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN.

2. Tujuan

- a. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.
- b. Memberikan gambaran pencapaian kinerja, kendala/permasalahan serta solusi dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tupoksi pada BPSDM Daerah Provinsi NTB guna peningkatan keuangan Perangkat Daerah berikutnya.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan dasar hukum, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Bidang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan serta data dan informasi umum lainnya

BAB II GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Menguraikan potensi dan kondisi eksisting dalam tiga tahun terakhir sesuai dengan Bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan deskripsi capaian kinerja tahun sebelumnya

BAB III ISU DAN PERMASALAHAN

Menguraikan isu dan permasalahan terkait Bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan

BAB IV PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD/RKPD yang dituju sesuai dengan Bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan beserta targetnya pada tahun 2024 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2026.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan beserta targetnya pada tahun 2024 dan target akhir periode Renstra OPD pada tahun 2024

4.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Menguraikan jenis pelayanan minimum dan targetnya serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan dan kebutuhan pendanaannya

4.4. RENCANA KERJA SERTA TARGET DAN PENDANAANNYA

Menguraikan Program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi serta target dan pendanaannya menurut sasaran strategis OPD.

BAB V CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

5.1 CAPAIAN KINERJA RPJMD

Menguraikan tingkat capaian indikator kinerja daerah RPJMD terhadap target tahun tahun 2024 dan terhadap target akhir periode RPD pada tahun 2026 sesuai dengan Bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan

5.2. CAPAIAN KINERJA RENSTRA

Menguraikan tingkat capaian indikator kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra OPD terhadap target tahun tahun 2024 dan terhadap target akhir periode Renstra OPD pada tahun 2026

5.3. CAPAIAN KINERJA RENJA OPD

Menguraikan capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran dan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renja OPD dan dukungan dari pihak lain

5.4. CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN

Menguraikan tingkat capaian kinerja program unggulan serta bentuk kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renja OPD dan dukungan dari pihak lain

5.5. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Menguraikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja

5.6. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Menguraikan saran dan tindak lanjut untuk perbaikan dalam pencapaian kinerja

BAB VI PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Menguraikan Capaian kinerja berdasarkan target dan jenis pelayanan minimum serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan dan dukungan alokasi pendanaannya (tidak ada).

BAB VIICAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN
YANG DIARAHKAN.

BAB VIII CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN

BAB IX PENUTUP

Menguraikan kesimpulan yang mendeskripsikan tingkat capaian kinerja
Perangkat Daerah

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM

BPSDM DAERAH PROVINSI NTB

2.1 TUGAS DAN FUNGSI

BPSDM Daerah Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan serta tugas dan fungsinya, difokuskan pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan bentuk Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana hal tersebut sebagai komponen yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri sesuai dengan kebutuhan kerja. Disamping itu berdasarkan Undang – undang Nomor 20 tahun 2023 pasal 49 tentang Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi . Pengembangan Kompetensi ASN ini juga diatur juga dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 pasal 18 tentang setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan, di mana Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun sedangkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 pasal 5 tentang setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan/atau hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan, di mana Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

Kedudukan BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau disebut BPSDM Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPSDM Daerah Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2 POTENSI DAN KONDISI EKSISTING BPSDM DAERAH PROVINSI NTB.

2.2.1. POTENSI

Sebagai Lembaga Pelatihan ter-Akreditasi, BPSDM Daerah Provinsi NTB memiliki kewenangan terhadap seluruh pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN lingkup Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, baik Pengembangan Kompetensi Manajerial, Kepemimpinan, Fungsional, Teknis, Bimbingan Teknis, Seminar, Workshop dan Pengembangan Kompetensi sejenis lainnya serta Uji Sertifikasi Kompetensi bagi ASN. Hal ini telah didukung dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana susunan Struktur Organisasi BPSDM Daerah Provinsi NTB telah sesuai dengan jenis Pengembangan Kompetensi yang dibutuhkan. Untuk memenuhi Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi NTB pelaksanaan kegiatan tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPSDM Daerah Provinsi NTB, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB menggunakan pola Kontribusi, Fasilitasi dan Kerjasama. Pola pelaksanaan kegiatan Kontribusi, Fasilitasi dan Kerjasama tidak sebatas dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB saja, namun juga mencakup Kementrian/Lembaga bahkan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tergantung pada jenis Pengembangan Kompetensi yang dibutuhkan. Pelaksanaan kegiatan dengan pola-pola diatas sangat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Provinsi NTB melalui biaya sewa terhadap sarana dan prasarana Pengembangan Kompetensi yang ada di BPSDM Daerah Provinsi NTB.

Jika dilihat dari sisi sarana dan prasarana yang tersedia di BPSDM Daerah Provinsi NTB cukup memadai, walaupun masih ada kekurangan dalam memenuhi standar minimal Lembaga Pengembangan Kompetensi misalnya untuk pelaksanaan PKN II. Namun Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lain seperti asrama bagi peserta Pengembangan Kompetensi secara klasikal (tatap muka), ruang kelas, aula, ruang CAT maupun jaringan Internet yang tersedia untuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara Distance Learning sudah terpenuhi.

Untuk tenaga pengajar, BPSDM Daerah Provinsi NTB memiliki 28 (dua puluh delapan) orang widyaiswara, yang terdiri dari widyaiswara ahli utama 15 orang, widyaiswara ahli madya 10 orang dan widyaiswara ahli muda 2 orang, widyaiswara ahli pertama 1 orang. Keberadaan widyaiswara dalam Pengembangan Kompetensi ASN sangatlah penting. Dengan Tugas Pokok melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah, widyaiswara diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan baik ASN untuk menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam mewujudkan profesionalisme aparatur. Pengetahuan sebagai salah satu aset penting bagi organisasi yang perlu dimanfaatkan. Pengembangan Kompetensi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan Pengetahuan dan Kompetensi bagi ASN. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan bagi ASN, dapat melahirkan ide maupun pengetahuan baru sebagai salah satu unsur yang dapat merangsang kreativitas dan Inovasi. dan menjadi hal penting juga bagi ASN untuk terus meningkatkan Kompetensinya agar dapat unggul dan tidak tertinggal dengan perubahan dan kecanggihan teknologi saat ini untuk dapat mencapai tujuan yang tepat sasaran.

Selain itu untuk menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Perangkat Daerah pelaksana Pengembangan Kompetensi, BPSDM Daerah Provinsi NTB juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat , yang mana pada Pasal 19 ayat (1) “Untuk Efektifitas dan efisiensi, pengelolaan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara terintegrasi dan terpusat melalui kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu pada BPSDMD Provinsi”. Selain itu, dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengatur mengenai pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara Klasikal (Tatap Muka), Blended Learning (Campuran) dan Distance Learning/e-Learning (Jarak Jauh).

Pada Renstra BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026 juga telah ditetapkan Indikator Tujuan BPSDM Daerah Provinsi NTB yaitu Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi. Hal ini selaras dengan Tugas dan Fungsi BPSDM Daerah sebagai Lembaga ter-Akreditasi Pengembangan Kompetensi ASN.

2.2.2. KONDISI EKSISTING

Pengembangan Kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan sehingga dapat

memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja .

Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariernya. Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan pegawai. . Pengembangan meliputi seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan.

Namun kondisi saat ini bahwa Pengembangan Kompetensi bagi ASN belumlah menjadi perhatian utama, baik dari Stakeholder maupun dari masing-masing individu seorang ASN. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan terhadap kompetensi ASN di hampir seluruh Perangkat Daerah. Kesenjangan dapat mengakibatkan tujuan dari suatu Perangkat Daerah tidak tercapai tepat sasaran, dikarenakan Implementasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan.

BPSDMD Provinsi NTB sebagai leading sektor pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Provinsi NTB melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terakreditasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut berusaha menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) berkoordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi. Selain itu BPSDMD Provinsi NTB juga tengah menyusun strategi peningkatan Pengembangan Kompetensi ASN melalui konsep Corporate University yaitu Implementasi dari konsep Learning Organization yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan mengatasi kelambatan dan ketidakmampuan proses pembelajaran teoritis yang didapatkan di Perguruan Tinggi konvensional dengan tuntutan praktik kerja yang sebenarnya.

2.3 SUSUNAN ORGANISASI

Sebagai organisai Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki penjenjangan dalam struktur Organisasi mulai dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

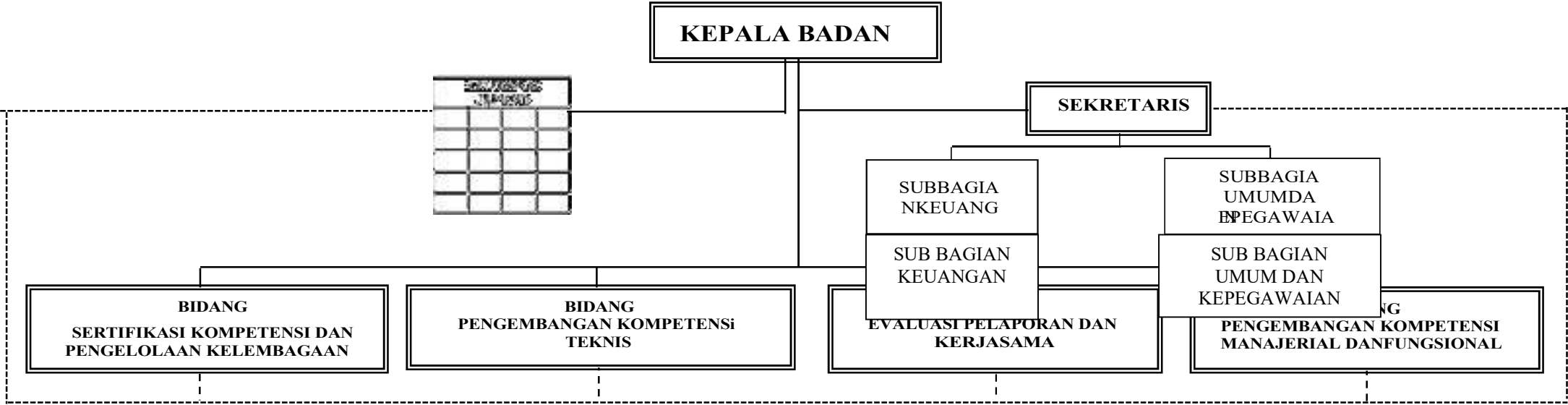
Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB terdiri dari:

- A. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- D. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- E. Bidang Evaluasi Pelaporan Dan Kerjasama;
- F. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional; dan
- G. Kelompok Jabatan Fungsional/Widyaiswara

Adapun bagan struktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN Ie: PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGERA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd

H.ZULKIEFLIMANSYAH

2.4 CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN 2023)

Adapun realisasi capaian kinerja tahun 2023 pada BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

I) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN Rp.19.097.058.380REALISASI Rp.16.873.581.702atau 88.36% realisasi fisik 90%

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran Rp. 612.960.600realisasi Rp. 416.037.117atau 67.87% realisasi fisik 87.03%

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target capaian	4 dokumen
Realisasi capaian	4 dokumen
Output	Renja murni 2024 ,renja perubahan 2024 ,Drat dokumen renstra 2024 - 2026 ,Dokumen renstra 2024 - 2026
Persentase capaian	100%

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target capaian	3 dokumen
Realisasi capaian	4 dokumen
Output	RKA 2024,DPA 2024, ANGGARAN KAS 2024
Persentase capaian	100%

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Target capaian	3 dokumen
Realisasi capaian	4 dokumen
Output	RKAP 2024,DPAP 2024,anggaran kas perubahan 2024, DPA revisi 2024
Persentase capaian	100 %

d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target capaian	16 laporan
Realisasi capaian	16 laporan
Output	12 laporan realisasi fisik, 4 dokumen laporan capaian kinerja
Persentase capaian	100 %

e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target capaian	12 laporan
Realisasi capaian	12 laporan
Output	Rencana aksi anggaran murni 1,rencana aksi anggaran perubahan 1,realisasi rencana aksi 2 dokumen,PK eselon II murni,PK eselon II perubahan,capaian PK eselon II murni, capaian PK eselon II

- perubahan,IKU,RKT,LAKIP,Laporan tahunan
- Persentase capaian 100 %
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran Rp. 13.957.522.001realisasi Rp. 12.684.319.836 atau 90.88% realisasi fisik 100%**
- a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Target capaian 90 orang
- Realisasi capaian 88 orang.
- Output Seluruh ASN BPSDM Daerah Provinsi NTB yang memperoleh gaji dan tunjangan selama 1 tahun
- Persentase capaian 98 %
- b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Target capaian 12dokumen
- Realisasi capaian 12 dokumen
- Output Tenaga administrasi keuangan yang memperoleh honor 12 bulan.
- Persentase capaian 100 %
- c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Target capaian 1 laporan
- Realisasi capaian 1 laporan
- Output Laporan Keuangan Tahunan
- Persentase capaian 100 %
- d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Target capaian 18 laporan
- Realisasi capaian 18 laporan
- Output Laporan realisasi bulanan keuangan sebanyak 12 laporan,laporan realisasi keuangan triwulan 4 laporan dan 2 laporan realisasi keuangan semesteran.
- Persentase capaian 100 %
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran Rp. 43.907.800 realisasi Rp. 43.907.800 atau 100% realisasi fisik 100%**
- a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Target capaian 1 laporan
- Realisasi capaian 1 laporan
- Output Laporan hasil pengelola asset pada BPSDM Daerah Provinsi NTB
- Persentase capaian 100 %
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran Rp. 752.581.455realisasi Rp. 575.755.201 atau 76.50% realisasi fisik 85.80%**
- a Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Target capaian 10 paket

	Realisasi capaian	10 paket
	Output	Penyediaan instalasi berupa Kabel NYM 2x2,5 Lampu LED 3 watt, Lampu LED 10 watt Lampu LED 33 watt, Cok Roll Merk Royal 10 M Baterai ABC Sedang, Baterai Alkaline AAA.
	Persentase capaian	100 %
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Target capaian	70 paket
	Realisasi capaian	70 paket
	Output	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun
	Persentase capaian	100 %
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Target capaian	20 paket
	Realisasi capaian	20paket
	Output	Pengisian tabung gas Wisma Tambora 20 buah
	Persentase capaian	100 %
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Target capaian	2 paket
	Realisasi capaian	2 paket
	Output	Cetak dan penggandaan selama satu tahun
	Persentase capaian	100 %
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Target capaian	1 dokumen
	Realisasi capaian	1 dokumen
	Output	Penyediaan dokumen bahan bacaan berupa surat kabar.
	Persentase capaian	100 %
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Target capaian	100 laporan
	Realisasi capaian	95 laporan
	Output	Jumlah laporan perjalanan dinas baik ke luar maupun dalam daerah yang dilakukan selama satu tahun pada BPSDM Daerah Provinsi NTB.
	Persentase capaian	95 %
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Anggaran Rp. 276.149.000 realisasi Rp. 231.628.000 atau 83.88% realisasi fisik 90%	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Target capaian	3
	Realisasi capaian	2
	Output	Kendaraan roda 2

	Persentase capaian	67 %
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Target capaian	21
	Realisasi capaian	20
	Output	Laptop Intel Core i5/i7 :8 GB DDR4 2 buah,AC 12 Unit,dispenser 1 buah,pemotong rumput 1,kipas angin 4 buah
	Persentase capaian	95 %
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran Rp. 2.292.227.524realisasi Rp. 1.990.811.245atau 86.85% realisasi fisik 100%	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Target capaian	2 laporan
	Realisasi capaian	2laporan
	Output	Laporan Surat keluar dan masuk yang telah di akomodir oleh BPSDM Provinsi NTB selama 1 tahun.
	Persentase capaian	100 %
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Target capaian	3 laporan
	Realisasi capaian	3 laporan
	Output	Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik oleh BPSDM Provinsi NTB selama
	Persentase capaian	100 %
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Target capaian	12 laporan
	Realisasi capaian	12 laporan
	Output	Laporan tenaga non PNS BPSDM Daerah Provinsi NTB yang memperoleh gaji selama 1 tahun
	Persentase capaian	100 %
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran Rp. 1.161.710.000realisasi Rp. 931.122.503 atau 80.15% realisasi fisik 100%	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
	Target capaian	18 unit
	Realisasi capaian	18 unit
	Output	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 sebanyak 5 unit, pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pejabat Eselon II sebanyak 1 unit, pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2

	sejumlah 12 unit.
	Persentase capaian 100 %
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Target capaian 5 unit
	Realisasi capaian 5 unit
	Output Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4) pada BPSDM Daerah Provinsi NTB
	Persentase capaian 100 %
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Target capaian 159 unit
	Realisasi capaian 159 unit
	Output Pemeliharaan genset 275 KVA, pemeliharaan mesin air 10 unit, pemeliharaan mesin cuci rumah tangga 2 unit, pemeliharaan mesin potong rumput 4 alat, pemeliharaan air conditioner (AC) 1 split 37 unit, pemeliharaan air conditioner (AC) standing floor 7 unit, pemeliharaan CCTV 10 unit, pemeliharaan televisi 40 unit, pemeliharaan water heater 10 unit, pemeliharaan jaringan network 1 tahun, pemeliharaan notebook/laptop 17 unit, pemeliharaan personal computer 5 unit, pemeliharaan printer 15 unit.
	Persentase capaian 58 %
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Target capaian 1 unit
	Realisasi capaian 1 unit
	Output Rehabilitasi Gedung ruang kerja
	Persentase capaian 100%

II) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANGGARAN Rp. 3.048.398.300 REALISASI Rp. 2.432.827.428 atau 79.81 % REALISASI FISIK 92.17%

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Anggaran Rp. 449.847.200 realisasi Rp. 295.093.584 atau 65.60% realisasi fisik 76.22%

a	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	Target capaian 4 dokumen
	Realisasi capaian 4 dokumen

	Output	Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Diklat Teknis yang akan dilaksanakan tahun 2023
	Persentase capaian	100%
b	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	
	Target capaian	4 dokumen
	Realisasi capaian	4 dokumen
	Output	Dokumen Standar Pembelajaran Diklat Teknis yang dilaksanakan tahun 2023
	Persentase capaian	100%
c	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
	Target capaian	200
	Realisasi capaian :	110
	Output (Dana APBD)/Provinsi	Pengembangan Kompetensi Penyusunan Peta Proses Bisnis, Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Pemerintah Level 1 30 orang, Pengembangan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C 30 orang.
	Output (Kemitraan)	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Level 1 - PNS Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 22 orang, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) - PNS Lingkup Makamah Agung se NTB 60 orang, Pelatihan GTA (Government Transformation Academy) – (PNS Lingkup Pemprov. NTB) 150 orang, Pelatihan Pemadam Kebakaran (Kabupaten Lombok Timur) 60 orang, Pelatihan Perencanaan Kontingensi Tingkat Provinsi NTB (BPBD Kabupaten/Kota se NTB 30 , BPPD Provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda dan BPSDMD) 30 orang, Workshop Gebyar Guru Digital (Guru SMA se P Lombok) 250 orang, Pelatihan Inovasi Pembelajaran Digital (Guru SMA/SMK se NTB) 250 orang, Pelatihan Inovasi Pembelajaran Digital (Guru SMA/SMK se NTB) 100 orang, Sosialisasi Sehat Produktif bagi Calon Purnabhakti 100 orang, Workshop Peningkatan Layanan Publik Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Program Bangga Kencana dan

	Percepatan Penurunan Stunting (BKKBN se Indonesia) 150 orang.
Pengembangan Kompetensi Teknis Yang tidak Terlaksana	Pengembangan Kompetensi/ Diklat BMD (Barang Milik Daerah) 90 orang, Diklat Capacity Building 134 orang
Alasan Tidak Terlaksana	
Persentase capaian	85,71 %
d Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
Target capaian	3 dokumen
Realisasi capaian	2 dokumen
Output	Dokumen Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi Teknis yang terlaksana
Persentase capaian	67%
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Anggaran Rp. 2.598.551.100 realisasi Rp. 2.137.733.844 atau 82.27% realisasi fisik 94.56%	
a Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	
Target capaian	2 dokumen
Realisasi capaian	2 dokumen
Output	Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi yang tersusun (dokumen PKA Provinsi dan dokumen PKA Kab/Kota kontribusi)
Persentase capaian	100%
b Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	
Target capaian	4 dokumen
Realisasi capaian	4 dokumen
Output	Dokumen Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri

	Provinsi yang tersusun
Persentase capaian	100 %
c Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
Target capaian	20 orang
Realisasi capaian :	76 orang
Output (Dana APBD)	Uji Sertifikasi uji kompetensi pbj 18 orang, Penyuluh anti korupsi 30 orang, polisi hutan 28 orang
Persentase capaian	380%
d Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
- Dokumen Kelembagaan	
Target capaian	4 dokumen
Realisasi capaian	6 dokumen
Output	Dokumen pelatihan, uji kompetensi, workshop, knowledge sharing, sosialisasi dan orasi ilmiah yang diikuti oleh tenaga pengembang pada BPSDM Daerah Provinsi NTB selama satu tahun.
Persentase capaian	150%
- Tenaga Pengembang Kompetensi	
Target capaian	28 orang
Realisasi capaian	28 orang
Output	Tenaga pengembang yang melakukan pelatihan 3 orang, tenaga pengembang yang melakukan uji kompetensi 5 orang, tenaga pengembang yang melakukan sosialisasi 24 orang, workshop 3 orang.
Persentase capaian	100%
- Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi	
Target capaian	120 orang
Realisasi capaian	120 orang
Output	Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi berupa pelatihan 9 orang,

	Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi berupa orasi ilmiah 3 orang, Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi berupa knowledge sharing 57 orang, Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi berupa sosialisasi 31 orang, Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi berupa workshop 19 orang, Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi berupa uji kompetensi 1 orang
Persentase capaian	100 %
e	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
Target capaian	10 dokumen
Realisasi capaian	25 dokumen
Output	Pola Perjanjian Kerja Sama (PKS) sejumlah 2 dokumen, Kesepakatan Bersama (KB) sejumlah 10 (sepuluh) dokumen, Perjanjian Kerja Sama (PKS) sejumlah 12 (dua belas) Dokumen, Adeddum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kabupaten/Kota Se NTB sejumlah 1 (satu) Dokumen.
Persentase capaian	250%
f	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
Target capaian	2 dokumen
Realisasi capaian	2 dokumen
Output	Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
Persentase capaian	100%
g	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
-	Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah
Target capaian	88 orang
Realisasi capaian	88 orang

Output	Bimtek Lurah Se Provinsi NTB
Persentase capaian	100%
- Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	
Target capaian	44 orang
Realisasi capaian	44 Orang
Output	Diklat PKA Kontribusi Kab/Kota 44 orang
Persentase capaian	100 %
- Orientasi PPPK	
Target capaian	449 orang
Realisasi capaian	449
Output	Orientasi PPPK Kabupaten Kota (pola kerjasama)
Persentase capaian	-
- Latsar CPNS	
Target capaian	403 orang
Realisasi capaian	403 orang
Output	Latsar CPNS (Kabupaten Kota) – Pola Kerjasama
Persentase capaian	224.36%
h Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
Target capaian	2 dokumen
Realisasi capaian	2 dokumen
Output	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Persentase capaian	100%

BAB III

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

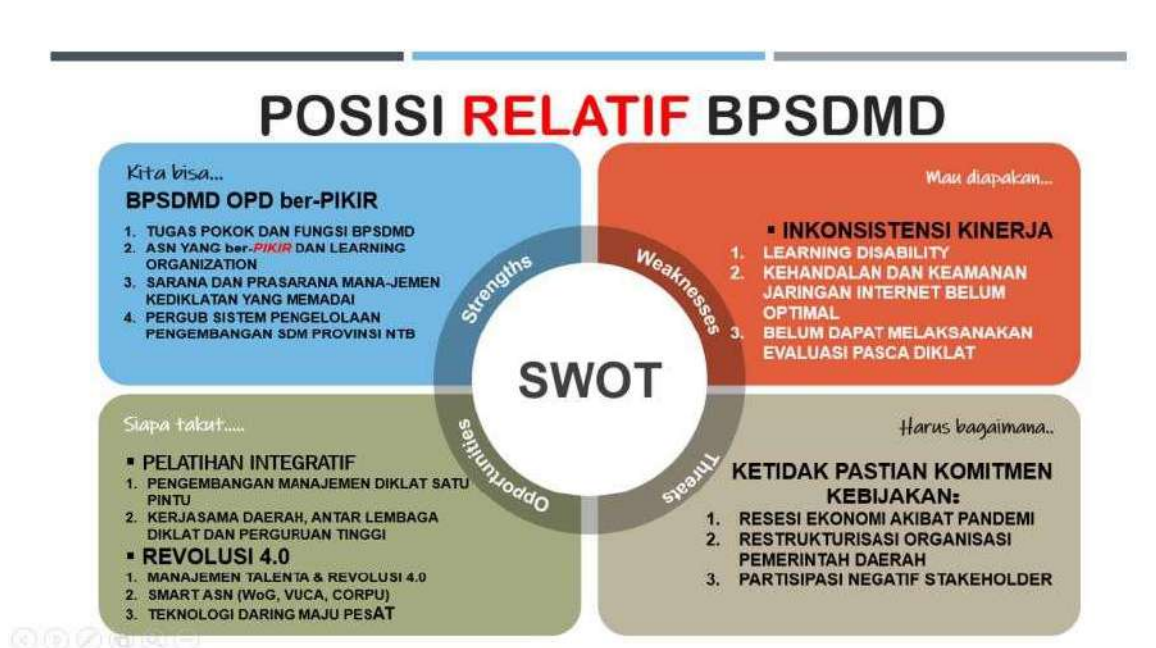
Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan, telaahan visi, dan program dan telaahan rencana strategis dari Kementerian atau Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis BPSDM Daerah Provinsi NTB.

3.1 ISU STRATEGIS BPSDM DAERAH PROVINSI NTB.

Dalam menentukan Isu Strategis, BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity and Threat) yang dapat ditunjukkan sesuai dengan bagan di bawah ini :



Berdasarkan skoring dari metode SMART diatas, BPSDMD Provinsi NTB menetapkan isu strategis pada Tahun 2024 yaitu **“GAP KOMPETENSI ASN ”**. GAP kompetensi merupakan kondisi dimana terdapat kesenjangan antara posisi atau jabatan yang diduduki oleh seorang ASN dengan Kompetensi yang dimiliki. Hal ini dapat terlihat melalui Penempatan Jabatan ASN yang tidak sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki. GAP Kompetensi ASN ini dapat diatasi melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) yang tersusun melalui hasil Pemetaan Jabatan oleh Biro Organisasi. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi akan memberikan Gambaran terhadap Profil ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang kemudian menjadi Pedoman atau Road Map bagi BPSDMD Provinsi NTB dalam menyusun Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN serta penempatan Jabatan yang dilakukan oleh BKD Provinsi NTB. GAP kompetensi ini menjadi suatu isu yang penting untuk dapat dituntaskan mengingat pada tahun 2024-2026 Provinsi NTB bercita-cita untuk dapat menjadikan dirinya sebagai Pusat Perekonomian Regional NUSTRA yang secara otomatis memberikan tantangan nyata bagi BPSDMD Provinsi NTB untuk menegaskan perannya dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam upaya mendukung cita-cita Provinsi NTB di tahun 2024-2026.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPSDMD PROVINSI NTB

Permasalahan BPSDMD Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan , yaitu :

- 1 Belum terakomodirnya kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN Pemprov NTB yang menunjang peningkatan kinerja sesuai dengan jabatan masing2
- 2 Tidak semua ASN menganggap pengembangan kompetensi penting untuk pengembangan kariernya
- 3 Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan diluar BPSDM Provinsi NTB belum sepenuhnya tercatat di BPSDMD NTB
- 4 Penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN belum didasarkan kepada Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)
- 5 Data Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB yang telah terinput pada aplikasi SIMADU masih banyak yang belum memenuhi JP wajib yaitu minimal 20 JP untuk PNS dan Maksimal 24 JP untuk PPPK sehingga perhitung Indeks Profesionalisme ASN (IPA) di Aplikasi SIASN BKN masih belum maksimal.
- 6 Masih Minimnya Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN selama ini baik bagi ASN yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berdampak pada terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi

BAB IV PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.1 SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPD/RKPD

Pada periode pembangunan jangka menengah Tahun 2019-2023 perumusan tujuan dan sasaran pada RPJMD mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sedangkan perumusan tujuan dan sasaran pada RPD tahun 2024 – 2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Fokus perencanaan Pembangunan Daerah pada periode 2024-2026 terdiri atas 3 pilar utama dan 3 pilar pendukung. Tiga pilar utama yaitu dimensi pembangunan manusia (People), dimensi pembangunan lingkungan (Planet) dan Dimensi Pembangunan kesejahteraan (Prosperity). Selanjutnya tiga pilar pendukung meliputi dimensi tata kelola (governance), dimensi pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan dimensi daya saing daerah (Competitiveness). Keenam dimensi tersebut menjadi dasar perumusan kerangka logis RPD ini yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026. Berdasarkan 6 pilar tersebut, BPSDM Daerah Provinsi NTB berada dalam posisi pilar pendukung yaitu pada Dimensi Tata Kelola, di mana Tujuan dari pembangunan dimensi ini adalah menciptakan suatu sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, memperkuat demokrasi, dan menciptakan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Agenda dan output dari dimensi tata kelola ini salah satunya dalam RPD tahun 2024 – 2026 (halaman V1-10) adalah **Peningkatan Profesionalisme ASN dengan rincian pada Peningkatan Kualitas Kompetensi Melalui Kediklatan**. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB, merumuskan tujuan dan sasaran Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

T.4.1 TUJUAN dan SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline		Target			Target Akhir
			2022	2023	2024	2024	2024	
Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	67,02	BB	BB	BB	A	A
Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	A	A	A	A
Sasaran : Meningkatnya Kemandirian fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	1,468	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator - indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk Dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran memperhatikan Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan Fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 4.2.1

TUJUAN DAN SASARAN BPSDM DARERAH PROVINSI NTB TAHUN 2024 -2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-			Formulasi Perhitungan
					2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Meningkatnya Kompetensi ASN	Rata rata ASN yang memiliki kompetensi	0.29 point	0.30 point	0.32 point	Formulasi Perhitungan : Jumlah Persentase Hasil per Jenis Pengembangan Kompetensi Tipe Perhitungan: Perhitungan bobot pengembangan kompetensi sesuai dengan perhitungan IPA Dimensi Kompetensi

4.3 Rencana Kerja Serta Target dan Pendanaannya

Pada tahun anggaran 2024 BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan

Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- d. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
- b. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- e. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
- f. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- g. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- h. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

T.4.3.1
RENCANA, PROGRAM, DAN PENDANAAN BPSDM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2026
BERDSARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi							22.405.456.680		19.605.456.680		20.705.456.680		20.705.456.680	BPSDM
		Tingkat Kualitas Pelayanan Urusan Penunjang Daerah Provinsi	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD		A	17.722.983.553	A	17.077.443.225	A	17.418.992.089	A	17.418.992.089	Sekretariat

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2024		2025		2026				
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	
		Meningkatn ya Efektifitas dan Transparan si Retribusi dan LLPAD pada BPSDMD Provinsi NTB			Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	%	7-10		10- 15		>15		>15		
		Meningkatn ya Kualitas Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.04.01 .1.01	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Doku men	37	267.113. 000	36	249.500.0 00	36	263.000.0 00	36	263.000. 000	Sekretariat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	115.000.000	2	120.000.000	2	122.000.000	2	122.000.000	Sekretariat
		Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	60.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	Sekretariat
		Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	dokumen	1	59.113.000	1	50.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	Sekretariat

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2024		2025		2026				
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	
					RKA-SKPD										
		Tersusunnya laporan capaian dan koordinasi Kinerja SKPD	5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	26	10.000.000	26	9.500.000	26	11.000.000	26	11.000.000	Sekretariat

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2024		2025		2026				
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	
		Tersusunnya laporan evaluasi Kinerja PD	5.04.01 .1.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	6	23.000.0 00	6	20.000.00 0	6	21.000.00 0	6	21.000.0 00	Sekretariat
		Meningkatn ya kualitas pengelolaan administras i keuangan	5.04.01 .1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Dok	31	13.707.1 49.901	31	13.614.10 5.965	31	13.789.00 0.000	31	13.789.0 00.000	Sekretaria t/Subbagia n Keuangan
						org	115		115		115		115		
		Meningkatn ya Kualitas Kinerja ASN	5.04.01 .1.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	13.497.1 45.901	115	13.424.10 5.965	115	13.604.00 0.000	115	13.604.0 00.000	Subbagian Keuangan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi ASN	5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	153.309.800	12	140.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	Subbagian Keuangan
		Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Keuangan PD	5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun SKPD	Laporan	1	33.195.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Subbagian Keuangan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/TR W/Semester an PD	5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	23.499.200	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	Subbagian Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi BMD	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	4	41.872.800	4	41.872.800	4	45.000.000	4	45.000.000	Sekretariat/ Subbagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		'Meningkatnya kualitas Penatausahaan BMD	5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	41.872.800	4	41.872.800	4	45.000.000	4	45.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.04.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas pengelolaan	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah ketersediaan Administrasi	Paket	83	503.997.950	83	433.000.000	83	437.000.000	83	408.000.000	Sekretariat / Subbagian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		administrasi umum perangkat daerah		Daerah	umum perangkat daerah	dok/laporan	54		47		52		54		Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketersediaan instalasi Listrik/Penerangan	5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	86.031.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	70	84.675.950	70	75.000.000	70	75.000.000	70	75.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik	5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Kantor													
		Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	17.196.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Informasi Bagi ASN	5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15.660.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	52	296.435.000	45	245.000.000	50	249.000.000	52	220.000.000	Subbagian Program

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
					SKPD										
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	754	212.833.173	53	73.283.336	107	168.310.965	7	168.310.965	Sekretariat/ Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas Jabatan;	5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	74.114.000	1	30.000.000	1	30.000.000	-	-	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Paket Mebel yang Disediakan	5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	610	-	1	3.283.336	5	20.000.000	5	68.310.965	Subbagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Mesin PD	5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	141	138.719.173	50	10.000.000	100	68.310.965	100	100.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawai an
		Meningkatnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1	30.000.000	1	50.000.000	-		Subbagian Umum dan Kepegawai an
		Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Person	100	2.204.786.729	100	1.927.581.124	100	1.927.581.124	100	1.927.581.124	Sekretariat/ Subbagian Umum dan Kepegawai an

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Ketersediaan Jasa Komunikasi	5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	625.882.929	12	348.677.324	12	348.677.324	12	348.677.324	Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.576.203.800	12	1.576.203.800	12	1.576.203.800	12	1.576.203.800	Subbagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	479	660.230.000	437	613.100.000	452	664.100.000	490	693.100.000	Sekretariat/ Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Meningkatnya Kualitas Kendaraan Perorangan/ Dinas Jabatan	5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	153.100.000	21	153.100.000	21	153.100.000	21	153.100.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2024		2025		2026				
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	
		Meningkatn ya Kualitas kendaraan dinas operasional/l apangan	5.04.01 .1.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	90.000.0 00	6	90.000.00 0	6	90.000.00 0	6	90.000.0 00	Subbagian Umum dan Kepegawai an
		'Meningkarn ya kualitas peralatan dan mesin PD	5.04.01 .1.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	441	167.130. 000	400	150.000.0 00	412	156.000.0 00	448	150.000. 000	Subbagian Umum dan Kepegawai an
		Meningkatn ya Kualitas Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.04.01 .1.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	11	250.000. 000	10	220.000.0 00	13	265.000.0 00	15	300.000. 000	Subbagian Umum dan Kepegawai an

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
							2024		2025		2026					
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)		
		Meningkatn ya ASN yang bersertifika t kompetensi Manajerial	5.04.02	Program Pengembang an Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	Point	0,10	4.682.47 3.127	0,10	2.528.013 .455	0.10	0.10	3.286.46 4.591	3.286.46 4.591	Bidang Pengemba ngan Kompetens i Manajerial dan Fungsional	
		Meningkatn ya ASN yang bersertifika t kompetensi Fungsional			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional		0,02		0,02		0.02				0.02	Bidang Pengemba ngan Kompetens i Manajerial dan Fungsional
		Meningkatn ya ASN yang bersertifika t kompetensi			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis		0,17		0,18		0.20				0.20	Bidang Pengemba ngan Kompetens i Teknis

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2024		2025		2026				
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	
		teknis													
		Meningkatn ya ASN yang Tersertifika si			Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	Perse n	29		30		32		32		
		Meningkatn ya kualitas pengemban gan kompetensi teknis	5.04.02 .1.01	Pengembang an Kompetensi Tekhnis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembanga n kompetensi teknis	orang	180	523.042. 000	120	392.504.0 00	120	452.880.0 00	120	452.880. 000	Bidang Pengemba ngan Kompetens i Teknis
					Jumlah dokumen pengembanga n kompetensi teknis	doku men	7		7		7		7		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis	5.04.02.1.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	2	38.393.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis/Subbidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi teknis	5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	2	38.393.000	2	40.000.000	2	41.000.000	2	41.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis/ Subbidang Penyusunan Standart Kompetensi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Terselenggarannya pengembangan kompetensi teknis	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	180	446.256.000	120	287.504.000	120	366.880.000	120	366.880.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis/Sub bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi teknis	5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi.	Dokumen	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama/Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Kompetensi Teknis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Meningkatnya kualitas pengembangan kelembagaan sumber belajar dan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional serta sertifikasi kompetensi	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang	75	4.159.431.127	75	2.135.509.455	75	2.833.584.591	75	2.833.584.591	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
		kompetensi manajerial, fungsional serta sertifikasi kompetensi			Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	Orang	588		377		618	618		Bidang Pengembangan Kompetensi Menejerial dan Fungsional	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
					Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	Dokumen	32		39		46		47		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional , 2.Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama ,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembang Kompetensi.	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional/ Subbidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Pengelolaan Kelembagaan

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2024		2025		2026				
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	
				Sertajabatan Fungsional											

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya dokumen pengelola LSP-PDN	5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	3	59.170.400	3	50.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan/Subbidang Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi ASN	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/K	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	Orang	200	125.000.000	200	120.000.000	200	122.613.746	200	122.613.746	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pemgelolaan Kelembagaan/Subbidang sertifikasi Kompetensi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan dan sumber belajar	5.04.02.1.02.04	:Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	3	409.574.947	3	250.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan/Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi
		Tersusunnya dokumen kerjasama antar lembaga	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	18	88.316.100	27	50.000.000	33	70.000.000	33	70.000.000	Bidang Evaluasi dan Pelaporan/Subbidang Kerjasama Antar Lembaga

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatn Fungsional yang Disusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan/ Subbidang Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
		Terselenggaranya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,	Orang	588	3.327.369.680	377	1.565.509.455	618	2.150.970.845,00	618	2.150.970.845	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional/ Subbidang Pengembangan

TUJU AN	INDIK ATOR TUJU AN	SASARAN	KODE REKE NING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2024		2025		2026				
							TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	TAR GET	RP (000)	TA RG ET	RP (000)	
				Fungsional, Kepemimpina n, dan Prajabatan	dan Prajabatan.										Kompetensi Mnajerial dan Fungsional

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
		Tersusunnya dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabtan	Dokumen	4	100.000.000	2	50.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama/Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026				
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
				Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Jabatan.										

BAB V

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja BPSDM Daerah Provinsi NTB yang dilaksanakan dari program kegiatan yang mengacu pada anggaran RPD tahun 2024 – 2026 ,RENSTRA tahun 2024 – 2026,RENJA tahun 2024 dan DPPA 2024.

5.1. Capaian Kinerja RPD.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024-2026 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Di mana untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan, program, sasaran dan tujuan, dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) pada RPD ini digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran kemajuan daerah untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan dalam rencana Program Strategis yang bersifat lintas sektor dan sectoral, di mana Indikator Kinerja Utama (IKU) berada pada level gubernur dan dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada level di bawahnya. penetapan IKU ini dilakukan secara berjenjang dari level Top untuk merangkum kinerja Kepala Daerah dan dijabarkan menjadi level Satu untuk jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Selanjutnya, IKU pada level Dua merupakan penjabaran dari target capaian kinerja seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB. IKU pada level Tiga merupakan capaian kinerja seluruh Pejabat Administrator (Eselon 3), dan terakhir IKU pada level Empat menjadi acuan untuk capaian target kinerja para pejabat Eselon 4, pejabat fungsional, dan pelaksana yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah.(Sumber:RPD Tahun 2024-2026 hal:VIII-1).

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada RPD 2024-2026

Indikator	Satuan	Target Akhir RPD Tahun 2026	Tahun 2024		% Tingkat Capaian	
			Target	Realisasi	Terhadap Target 2024	Terhadap Target Akhir RPD 2024
Dimensi Kompetensi	%	32	29	26,99	93	84
Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi dan LLPAD)	%	>15 (16)	7-10 (7)	6.8	97,14	42,5

Sumber : RPD Tahun 2024-2026 (hal:VIII-21)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dapat dijabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada RPD 2024-2026 antara lain:

1. Dimensi kompetensi dengan target capaian sebesar 29% pada Tahun 2024 baru tercapai sebesar 26,99% atau tingkat capaiannya 93%, sedangkan untuk target dimensi Kompetensi Akhir RPD yaitu Tahun 2026 sebesar 32% diperoleh tingkat capaian sebesar 84%.
2. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada (Retribusi dan LLPAD) yang ditetapkan oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB sebagai pembandingnya adalah target pada RPD Tahun 2024 antara 7-10 persen namun BPSDM NTB menggunakan taget 7 % terealisasi 6,8 % dengan tingkat capaian 97,14%, sedangkan untuk target akhir RPD Tahun 2026 sebesar >15% BPSDM Daerah Provinsi NTB menggunakan target 16% sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 42,5%

5.2. Capaian Kinerja RENSTRA

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Renstra PD sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Namun dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD pada tahun 2023, untuk saat ini periode Renstra berjalan untuk periode 3 (tiga) tahun, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Renstra Tahun 2024 – 2026 ini merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2026 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Tabel 5.2 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2024		Tingkat Capaian Tahun 2024 (%)	
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah								
Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	%	29	Rp.4.682.473.127	26,99	Rp.1.969.432.343	93,07	42,06
Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah								
Meningkatnya Kompetensi ASN	Rata rata ASN yang memiliki kompetensi	%	29	Rp.2.041.500.000	26,99	Rp.1.969.432.343	93,07	96,45
Program Perangkat Daerah								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Kategori	A	Rp.20.007.335.899	BB (77,23)	Rp.18.940.649.756	A	94,67
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada BPSDM (Retribusi dan LLPAD)	%	7	Rp.1.744.500.000	6,8	Rp.1.744.500.000	97,14	100

Tujuan/Sasaran/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2024		Tingkat Capaian Tahun 2024 (%)	
Program			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	10	Rp.2.041.500.000	5	Rp.1.969.432.343	50	96,45
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	2		2,5		125	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	17		19,4		114,12	
	Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	%	0,29		0,41		141,38	

Berdasarkan tabel capaian indikator urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang bidang pendidikan dan pelatihan tahun 2024 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja Utama sesuai RPD 2024 -2026 yaitu indeks profesionalisme ASN pada **Dimensi kompetensi** . Indikator tersebut mendukung Tujuan Pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 yaitu pada **Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**. Target yang ditetapkan untuk indikator Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi tahun 2024 adalah 29 %, dengan capaian di tahun 2024 sebesar 26,99 % atau dengan tingkat capaian 93% . Berbagai Upaya dalam bentuk penyelenggaraan program yang mendukung pencapaian indikator indeks profesionalisme ASN yaitu: program pengembangan sumberdaya manusia meliputi kegiatan pengembangan kompetensi teknis,pengembangan kompetensi manajerial/kepemimpinan dan fungsional.
- b. Setelah diturunkan ke dalam Renstra, BPSDM Daerah Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 yaitu “Meningkatnya Kompetensi ASN“ dengan indikator yaitu “Rata-Rata ASN yang memiliki Kompetensi.

Indikator rata – rata ASN yang memiliki kompetensi tahun 2024 dari target 29 % terealisasi capaian sebesar 26,99% dengan tingkat capaian sebesar 93 % . Capaian 93 % untuk capaian rata-rata ASN yang memiliki kompetensi dapat dikatakan berpredikat baik karena hampir memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan jika dilihat dari target dan capaian IPA Dimensi Kompetensi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi NTB secara nasional yaitu di angka 29 %, dapat dikatakan IPA dimensi kompetensi NTB masih rendah.

Adapun Kegiatan tambahan BPSDM Daerah Provinsi NTB yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi BPSDM Daerah pada Tahun 2024 yaitu adanya Program Pendidikan Cost Sharing Bidang Perencanaan Pembangunan bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB jenjang S2 yang bekerjasama dengan antara Bappenas RI, Universitas Brawijaya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Perjanjian :PKSO 01/ 1'.01/ 05/ 2024.. Pelaksanaan cost sharing ini dilaksanakan selama 5 tahun yaitu Tahun 2024 s/d 2029 yang bertujuan meningkatkan kapasitas ASN NTB , di mana dalam pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2024 masuk ke dalam indikator IPA (Indeks Profesionalisme ASN) dimensi kualifikasi yang berada pada BKD, namun jika dilihat dari tugas dan fungsi berdasarkan **Pergub no 9 Tahun 2023** terdapat persamaan tusi antara BPSDM Pemerintah Provinsi NTB dan BKD Provinsi NTB yaitu pada pelaksanaan pendidikan formal, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan kegiatan beasiswa ini diberikan kepada BPSDM oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Untuk mendapatkan angka capaian Renstra secara program kegiatan maka diperlukan evaluasi terhadap capaian Renstra dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dengan menggunakan formulir Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB tahun 2024 - 2026 berdasarkan Nomenklatur Permendagri No 90 Tahun 2019) terdapat pada lampiran **Formulir E.54.1 (Laporan lampiran I.1)**

5.3 Capaian Kinerja Renja OPD Tahun 2024

Keberhasilan BPSDM Daerah Provinsi NTB dalam mencapai target pada Renja Tahun 2024 dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi capaian Tahun 2024 dengan target berdasarkan anggaran Renja Perubahan Tahun 2024 pada masing-masing Indikator Kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Dalam mendukung berjalannya Renja program/kegiatan/sub kegiatan pada BPSDM daerah Provinsi NTB tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran **Perubahan Renja sebesar Rp. 21.474.103.339 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.910.082.099 atau sebesar 97% realisasi fisik 100%**

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 pada BPSDM Daerah Provinsi NTB Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut : (Lampiran Laporan II Formulir E.55)

Berikut Rincian Capaian dari Target Renja Perubahan Tahun 2024 terhadap realisasi anggaran Tahun 2024:

- I) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN
Rp.19.604.103.339 REALISASI Rp.18.940.649.756 atau 97% realisasi fisik 100%
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran
Rp.380.229.350 realisasi Rp. 469.142.163 atau 123,4%
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Target capaian2 dokumen
- Realisasi capaian2 dokumen
- OutputDokumen Renja murni 2024 ,dokumen draft
renstra 2025 - 2029
- Persentase capaian123,38%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Target capaian1 dokumen
- Realisasi capaian1 dokumen
- OutputRKA 2025
- Persentase capaian100%
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Target capaian1 dokumen
- Realisasi capaian1 dokumen
- OutputRKAP 2024
- Persentase capaian100 %
- d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
- Target capaian26 laporan
- Realisasi capaian26 laporan
- OutputLaporan capaian kinerja 4 triwulan ,rencana aksi

		anggaran murni 1 dokumen,rencana aksi
		anggaran perubahan 1 dokumen,capaian rencana
		aksi 2 dokumen,laporan realisasi keuangan dan
		fisik 12 dokumen,PK eselon II murni 1
		dokumen,PK eselon II perubahan 1
		dokumen,capaian PK eselon II murni, capaian
		PK eselon II perubahan,IKU,RKT.
	Persentase capaian	100 %
e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Target capaian	6 laporan
	Realisasi capaian	6 laporan
	Output	Laporan evaluasi Renja dan Renstra 4 TRW
		,laporan tahunan (Tahun 2024) 1 laporan,LKJiP
		Tahun 2024 1 dokumen.
	Persentase capaian	100 %
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran Rp. 15.290.894.415 realisasi Rp. 14.892.918.845 atau 97,40%	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Target capaian	88 orang
	Realisasi capaian	86 orang
	Output	Dokumen Pertanggungjawaban Gaji dan
		Tunjangan ASN.
	Persentase capaian	97,45 %
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Target capaian	12 dokumen
	Realisasi capaian	12 dokumen
	Output	Dokumen hasil penyediaan administrasi bagian
		keuangan 12 dokumen.
	Persentase capaian	100 %
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Target capaian	1 laporan
	Realisasi capaian	1 laporan
	Output	Laporan keuangan Tahun 2024,
	Persentase capaian	100 %
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Target capaian	18 laporan
	Realisasi capaian	18 laporan
	Output	Laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan
		12laporan ,Triwulan 3 laporan dan Semesteran 2

	laporan.
Persentase capaian	100 %
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran Rp. 47.911.375 realisasi Rp. 58.351.375 atau 121,79%	
a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Target capaian	4 laporan
Realisasi capaian	4 laporan
Output	Laporan hasil pengelola asset pada BPSDM Daerah Provinsi NTB (Laporan pejabat pembuat komitmen, laporan pejabat pengadaan barang dan jasa, laporan pengurus barang, laporan pembantu pengurus barang)
Persentase capaian	100 %
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran Rp. 389.806.365 realisasi Rp. 438.121.519 atau 112,39 %	
a Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Target capaian	10 paket
Realisasi capaian	17 paket
Output	Baterai. Clem, cok roll, fitting, Kabel, Kap lampu, Lampu, mata solder tembaga, MCB, saklar, senter, solder listrik, steker arde, stop kontak, timah solder, Trafo.
Persentase capaian	170 %
b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Target capaian	70 paket
Realisasi capaian	70 paket
Output	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun
Persentase capaian	100 %
c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Target capaian	1 paket
Realisasi capaian	1 paket
Output	Pengisian tabung gas Wisma Tambora 20 buah
Persentase capaian	100 %
d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Target capaian	2 paket
Realisasi capaian	2 paket
Output	Cetak dan penggandaan selama satu tahun
Persentase capaian	100 %

- | | | |
|---|--|---|
| e | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | Target capaian | 2 dokumen |
| | Realisasi capaian | 2 dokumen |
| | Output | Penyediaan dokumen bahan bacaan berupa 2 jenis surat kabar. |
| | Persentase capaian | 100 % |
| f | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | Target capaian | 52 laporan |
| | Realisasi capaian | 60 laporan |
| | Output | Jumlah laporan perjalanan dinas baik ke luar maupun dalam daerah yang dilakukan selama satu tahun pada BPSDM Daerah Provinsi NTB. |
| | Persentase capaian | 115,38 % |
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Anggaran Rp. 408.382.700 realisasi Rp. 265.150.000 atau 64,93%
- | | | |
|---|---|---|
| a | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | Target capaian | - |
| | Realisasi capaian | - |
| | Output | - |
| | Persentase capaian | - |
| b | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | Target capaian | 20 unit |
| | Realisasi capaian | 18 unit |
| | Output | Meubelair 1 paket,lighting studio 3 unit,microphone condenser 2 unit, mic wireless/klip on 1 unit,camera vidio/camcorder 1 unit,tripood 3 unit,laptop intel core i9 1 unit,PC Intel core i9 1 unit,laptop intel core i5 5 unit. |
| | Persentase capaian | 90 % |
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran Rp. 2.083.130.834 realisasi Rp. 1.921.082.652 atau 92,22%**
- | | | |
|---|---|---|
| a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | Target capaian | 2 laporan |
| | Realisasi capaian | 2 laporan |
| | Output | Laporan Surat keluar dan masuk yang telah di akomodir oleh BPSDM Provinsi NTB selama 1 tahun. |
| | Persentase capaian | 100 % |
| b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |

	Target capaian	12 laporan
	Realisasi capaian	12 laporan
	Output	Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik oleh BPSDM Provinsi NTB selama 12 bulan
	Persentase capaian	100 %
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Target capaian	12 laporan
	Realisasi capaian	12 laporan
	Output	Laporan tenaga non PNS BPSDM Daerah Provinsi NTB yang memperoleh gaji selama 1 tahun
	Persentase capaian	100 %
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran Rp. 1.003.748.300 realisasi Rp. 895.883.202 atau 89,25%.	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
	Target capaian	21 unit
	Realisasi capaian	18 unit
	Output	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II sebanyak 1 unit, pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 5 unit, pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 sejumlah 12 unit.
	Persentase capaian	86 %
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Target capaian	5 unit
	Realisasi capaian	5 unit
	Output	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4) sebanyak 5 unit pada BPSDM Daerah Provinsi NTB
	Persentase capaian	100 %
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Target capaian	50 unit
	Realisasi capaian	115 unit
	Output	Pemeliharaan genset 275 KVA 1 unit, Pemeliharaan mesin air 1 unit, pemeliharaan mesin cuci rumah tangga 1 unit, pemeliharaan

	mesin potong rumput 1 unit, pemeliharaan air conditioner (AC) standing floor 8 unit, pemeliharaan AC split 52 unit, pemeliharaan CCTV, pemeliharaan water heater 1 unit, pemeliharaan jaringan network 1 paket, pemeliharaan note book/laptop 28 unit, pemeliharaan personal computer 5 unit, pemeliharaan printer 15 unit.
Persentase capaian	230 %
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Target capaian	6 unit (Rehab Gedung bertingkat dan tidak Bertingkat)
Realisasi capaian	5 unit
Output	Rehabilitasi Gedung Bertingkat (ruang kelas lantai atas), rehab gedung tidak bertingkat (toilet), rehab ruang Kepala Badan, Rehab ruang Poadcast, rehab ruang rapat besar.
Persentase capaian	83%

II) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANGGARAN Rp. 1.870.000.000 REALISASI Rp. 1.969.432.343 atau 105,32 %

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Anggaran Rp. 285.000.000 realisasi Rp. 283.946.190 atau 99,63%

- a Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- | | |
|--------------------|---|
| Target capaian | 2 dokumen |
| Realisasi capaian | 2 dokumen |
| Output | Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Diklat Teknis yang akan dilaksanakan tahun 2024 (Pelatihan PBJP Level 1 Lingkup Pemprov NTB, dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah) |
| Persentase capaian | 100% |
- b Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Target capaian	2 dokumen
Realisasi capaian	2 dokumen
Output	Dokumen Standar Pembelajaran Diklat Teknis yang dilaksanakan tahun 2024
Persentase capaian	100%
c	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Target capaian	120
Realisasi capaian :	5.435 (ASN Provinsi)
Output (Dana APBD)/Provinsi	Pelatihan PBJP Level 1 Lingkup Pemprov NTB sebanyak 30 orang, dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah 30 orang
Output (Kemitraan) – Inovasi Non Anggaran	Pelatihan PBJP Level 1 Lingkup Kabupaten Lombok Timur 30 orang, Literasi Digital Sektor Pemerintahan 21.065 (ASN Kab/Kota sebanyak 16.033 orang,ASN Provinsi NTB sebanyak 5.032 orang), Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Mendukung Perbaikan Layanan Dasar yang Inklusif sebanyak 150 orang ASN Provinsi NTB, Lokakarya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 30 orang ASN Provinsi NTB, Pelatihan PBJP Level 1 Lingkup ASN Kota Bima 30 orang, Pelatihan PBJP Level 1 Lingkup ASN Unram 24 orang, Pelatihan PBJP Level 1 Lingkup Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu dan Lombok Timur sebanyak 25 orang, Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi ASN Provinsi NTB sebanyak 30 orang dan 15 orang ASN Kab/Kota, Pelatihan Teknis Promosi Produk Ekspor ASN Pemerintah Provinsi NTB sejumlah 23 orang, Workshop Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat dan Kewaspadaan Makanan Sehat ASN Pemerintah Provinsi NTB sejumlah 75 orang, dan bimtek Pemeriksaan Pajak sebanyak 35 orang ASN Provinsi NTB.
Persentase capaian	4.529 %

- d Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- | | |
|--------------------|--|
| Target capaian | 2 dokumen |
| Realisasi capaian | 8 dokumen |
| Output | Dokumen Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi Teknis yang terlaksana (baik Pengembangan Kompetensi yang berasal dari anggaran APBD maupun dari pola Kerjasama – Non anggaran) |
| Persentase capaian | 400% |
- 2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Anggaran Rp. 2.598.551.100 realisasi Rp. 2.137.733.844 atau 82.27% realisasi fisik 94.56%**
- a Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
- | | |
|--------------------|--|
| Target capaian | 1 dokumen |
| Realisasi capaian | 1 dokumen |
| Output | Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional (dokumen perencanaan PKA Kab/Kota kontribusi) |
| Persentase capaian | 100% |
- b Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
- | | |
|-------------------|--|
| Target capaian | 3 dokumen |
| Realisasi capaian | 8 dokumen |
| Output | Penyusunan Dokumen TUK Mandiri Pelaksana Ujikom PBJ 1 dok, Penyusunan Dokumen TUK sewaktu LSP P2KPK 1 dok, Penyusunan Dokumen TUK Sewaktu Uji Kompetensi Jafung binaan Kementerian LHK 1 dok, Penyusunan |

	Dokumen Akreditasi PPBJ 1 dok, Penyusunan Dokumen Akreditasi PPBJ 1 dok, Penyusunan dokumen akreditasi pelatihan PIP (pembinaan ideologi pancasila 1 dok, Penyusunan Dokumen Penjaminan Mutu 1 dok, Penyusunan Dokumen Bangkom TPK (Tenaga Pengembang Kompetensi) 1 dok
Persentase capaian	267 %
c Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
Target capaian	20 orang
Realisasi capaian :	76 orang
Output (Dana APBD)	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Penyuluh Anti Korupsi 30 orang, Uji Sertifikasi dan Kompetensi PBJ 18 orang, Uji Sertifikasi dan Kompetensi Polisi Kehutanan 28 orang.
Persentase capaian	380%
d Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
- Dokumen Kelembagaan	
Target capaian	3 dokumen
Realisasi capaian	4 dokumen
Output	Dokumen Orasi Ilmiah,Dokumen Sidang tertutup Orasi Ilmiah, Dokumen Pelatihan TOT Team Narasumber Orientasi DPRD,Dokumen Pelatihan Calon Maheswara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase capaian	133%
- Tenaga Pengembang Kompetensi	
Output	Orasi Ilmiah 2 orang,Sidang tertutup Orasi Ilmiah 1 orang, Pelatihan TOT Team Narasumber Orientasi DPRD 10 orang,Pelatihan Calon Maheswara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 4 orang

- e Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
- | | |
|--------------------|--|
| Target capaian | 10 dokumen |
| Realisasi capaian | 35 dokumen |
| Output | Kesepakatan Bersama (KB) dengan Kab/Kota 9 dok, Perjanjian kerjasama (PKS) dengan Kab/Kota, Kementrian Lembaga 25 dok, Laporan Kerjasama Beasiswa S2 Afirmasi Brawijaya Bappenas 1 dok |
| Kegiatan lain | Beasiswa S2 Afirmasi Brawijaya –Bappenas 10 orang |
| Persentase capaian | 194% |
- f Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- | | |
|--------------------|--|
| Target capaian | 2 dokumen |
| Realisasi capaian | 2 dokumen |
| Output | Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional |
| Persentase capaian | 100% |
- g Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- **Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah**
- | | |
|--------------------|--|
| Target capaian | 385 orang |
| Realisasi capaian | 385 orang |
| Output | Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab/Kota |
| Persentase capaian | 100% |
- **Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan**
- | | |
|----------------|----------|
| Target capaian | 40 orang |
|----------------|----------|

	Realisasi capaian	40 Orang
	Output	Diklat PKA Kontribusi Kab/Kota
	Persentase capaian	100 %
-	Orientasi PPPK	
	Target capaian	1.448 orang
	Realisasi capaian	1.448 orang
	Output	Orientasi PPPK Kabupaten Kota (pola kerjasama)
	Persentase capaian	100%
h	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
	Target capaian	4 dokumen
	Realisasi capaian	4 dokumen
	Output	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	Persentase capaian	100%

5.4 Capaian Kinerja Program Prioritas

Dalam RPD tahun 2024 – 2026 (halaman VI 14 dan VI-24) BPSDM Daerah Provinsi NTB masuk ke dalam **Pilar pendukung 1 yaitu pada Tata Kelola dengan indikator terwujudnya Peningkatan Tata Kelola melalui Reformasi Birokrasi dengan Program Prioritas Daerah (PD) 5 yaitu “ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**. Program prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada BPSDM Daerah Provinsi NTB Secara umum isu utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, diantaranya:

- (1) Profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia ASN;
- (2) Kondisi fiskal;
- (3) Penataan kelembagaan atau reformasi birokrasi; dan
- (4) Pelayanan public

Dalam keempat isu ini, BPSDM Daerah Provinsi NTB terletak pada **Profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia ASN**. Sebagai acuan berdasarkan hasil penilaian Indeks Profesionalisme ASN Tahun anggaran 2019-2023 pada lingkungan Pemerintahan Provinsi NTB dinilai dalam kategori “Rendah” dengan rata-rata 0,62 point dari nilai bobot 1,00 point, hal ini disebabkan karena dimensi pendukung terbentuknya Indeks Profesionalisme ASN di mana salah satunya adalah **dimensi kompetensi** pada Provinsi NTB sulit tercapai. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Provinsi NTB untuk peningkatan kompetensi, dilakukan dengan memberikan pengembangan kompetensi secara berkala sesuai dengan kebutuhan analisis kebutuhan daerah, sosialisasi dan kemudahan izin bagi ASN untuk mengikuti diklat/workshop/seminar, lokakarya dan sejenisnya yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat kepesertaan. Adapun harapan kedepannya dengan disusunnya Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang merupakan upaya mengidentifikasi jenis pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, yang bertujuan agar para pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan jabatannya dan fungsinya masing-masing sehingga dapat digunakan BKD Provinsi NTB untuk penempatan ASN. Upaya lain yang dilakukan BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk mewujudkan profesionalisme ASN dimensi kompetensi ini pada tahun 2024 BPSDM terus melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan pengembangan kompetensi khususnya pada pengembangan kompetensi teknis yakni melalui pola kerjasama dan pola kemitraan dengan Lembaga dan instansi terkait tanpa menggunakan APBD, melaksanakan webinar melalui kegiatan yang bernama “ Rabu Cerdas” yang biasanya dilaksanakan setiap hari rabu setiap minggunya namun untuk Tahun 2024 kegiatan ini masih di tunda karena adanya perbaikan sarana prasarana

ruang podcast yang nantinya akan dapat dilaksanakan kembali pada Tahun 2025, dan melakukan pengumpulan data pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di luar BPSDM sehingga melalui inovasi ini diharapkan persentase pada IPA Dimensi Kompetensi ini dapat meningkat dengan atau tanpa dukungan anggaran yang terdapat pada DPA. Adapun perencanaan untuk inovasi kedepannya setelah BPSDM Daerah Provinsi NTB melakukan study tiru ke BPSDMD Jawa Barat, diharapkan pada rencana anggaran Tahun 2025 – 2029 melalui sebuah aplikasi, BPSDM Daerah Provinsi NTB dan BKD dapat bekerjasama dalam menghimpun dan melaksanakan Pengembangan kompetensi agar tercapai kewajiban PNS untuk mengikuti 20 JP untuk ASN dan 24 JP untuk PPPK, sehingga nantinya akan disusun regulasi yang akan menitikberatkan pada reward dan punishment yang diterima oleh ASN Pemerintah Provinsi NTB jika tidak atau mengikuti Bangkom selama satu tahun.

Program Prioritas Daerah yang merupakan program lintas sektor sebagai major project (proyek strategis) yang dapat mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, yang di mana berbagai program lintas sektor (major project) tersebut dikelompokkan sebagai Program Prioritas Daerah. Pelaksanaan prioritas daerah ini dijabarkan dalam program strategis daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan program strategis daerah ini ke dalam program pelaksanaan urusan yang nomenklturnya telah ditetapkan didalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan. Berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Program Prioritas pelaksanaan urusan BPSDM Daerah Provinsi NTB adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Adapun capaian untuk Program Prioritas pada BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 terdapat pada lampiran (Laporan I.3)

5.4 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pencapaian program kegiatan pada RPJMD, RENSTRA dan RENJA yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Belum terakomodirnya kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN Pemprov NTB yang menunjang peningkatan kinerja sesuai dengan jabatan masing2
2. Tidak semua ASN menganggap pengembangan kompetensi penting untuk pengembangan kariernya
3. Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan diluar BPSDM Provinsi NTB belum sepenuhnya tercatat di BPSDMD NTB

4. Penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN belum didasarkan kepada Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)
5. Data Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB yang telah terinput pada aplikasi SIMADU masih banyak yang belum memenuhi JP wajib yaitu minimal 20 JP untuk PNS dan Maksimal 24 JP untuk PPPK sehingga perhitung Indeks Profesionalisme ASN (IPA) di Aplikasi SIASN BKN masih belum maksimal.
6. Masih Minimnya Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN selama ini baik bagi ASN yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berdampak pada terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi.

5.5 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Permasalahanyang dihadapi oleh BPSDM Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pencapaian program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, maka dibutuhkan saran dan tindak lanjut antara lain :

1. Menyusun Regulasi tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP bagi PNS dan Maksimal 24 JP bagi PPPK dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan ASN yang kompeten dan profesional sesuai bidang tugasnya.
2. Merancang Regulasi mengenai hasil pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang berdampak bagi karir ASN.
3. Merancang Regulasi terkait pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Satu Pintu.
4. Merancang Skema Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan berkoordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi Provinsi NTB.
5. Mendorong diterapkan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (Corporate University) sesuai amanat Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 dengan nama “ NTB Corporate University” sehingga dapat memenuhi jumlah JP wajib ASN per tahun sesuai Amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN serta melaksanakan monitoring terhadap inputan Data Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi NTB pada Aplikasi SIMADU yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi SIASN BKN.
6. Melaksanakan Program "RABU CERDAS" (Webinar dan Podcast) untuk memudahkan ASN Provinsi NTB melakukan Pengembangan Kompetensi melalui media Daring

BAB VI
PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BPSDM Daerah Provinsi NTB pada tahun 2024 tidak membuat Penerapan Dan Capaian Standar Pelayanan Minimum.

BAB VII
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG
DIARAHKAN

Pada BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2024 tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan alokasi pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH -CHT). Sumber dana pelaksanaan program/kegiatan pada BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2024 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Rokok.

BAB VIII
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN

Pada BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2024 tidak terdapat Capaian Kinerja yang menggunakan dana dari Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

BAB IX

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN, BSDMD Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan serta tugas dan fungsinya, difokuskan pada Dimensi Kompetensi. Dimensi kompetensi merupakan salah satu dari empat komponen yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Profesionalisme ASN . di mana dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dengan jenis Pengembangan Kompetensi yaitu Kompetensi kepemimpinan, fungsional, teknis dan lainnya (seminar, sosialisasi, workshop, webinar dll).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu “Meningkatnya Kompetensi ASN” dengan indikator yaitu “Rata-Rata ASN yang memiliki Kompetensi dengan target 29 % terealisasi capaian sebesar 26,99% dengan tingkat capaian sebesar 93 % . Capaian 93 % untuk capaian rata-rata ASN yang memiliki kompetensi dapat dikatakan berpredikat baik karena hampir memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan jika dilihat dari target dan capaian IPA Dimensi Kompetensi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi NTB secara nasional yaitu di angka 29 %, dapat dikatakan IPA dimensi kompetensi NTB masih rendah. Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB sehingga tidak tercapainya target capaian rata – rata ASN yang memiliki Kompetensi Tahun 2024 antara lain:

1. Belum terakomodirnya kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN Pemprov NTB yang menunjang peningkatan kinerja sesuai dengan jabatan masing – masing.
2. Tidak semua ASN menganggap pengembangan kompetensi penting untuk pengembangan kariernya.
3. Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan diluar BPSDM Provinsi NTB belum sepenuhnya tercatat di BPSDMD NTB.
4. Penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN belum didasarkan kepada Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK).
5. Data Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB yang telah terinput pada aplikasi SIMADU masih banyak yang belum memenuhi JP wajib yaitu minimal 20 JP untuk PNS dan Maksimal 24 JP untuk PPPK sehingga perhitungan Indeks Profesionalisme ASN (IPA) di Aplikasi SIASN BKN masih belum maksimal.

6. Masih Minimnya Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN selama ini baik bagi ASN yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berdampak pada terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi.

Berdasarkan DPPA Tahun 2024 (Nomor : DPPA/A.3/5.04.0.00.0.00.01.000/001/2024 Tanggal 11 Oktober 2024) yang berasal dari anggaran APBD Provinsi NTB Tahun 2024, bahwa pagu anggaran sebesar **Rp.22.048.835.899** terealisasi sebesar Rp. 20.910.082.099 atau 94,84% dialokasikan untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Rp.20.007.335.899 realisasi Rp. 18.940.649.756 atau 94,67 % realisasi fisik 100 %, **Program Prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia** Rp. 2.041.500.000 realisasi Rp.1.969.432.343 atau 96,47% realisasi fisik 100 % . Adapun target untuk anggaran pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.744.500.000 terealisasi sebesar Rp.1.693.700.000 atau sebesar 97,09% terdiri dari retribusi daerah Rp.1,064.500.000 terealisasi sebesar Rp.1.005.450.000 atau 94,45%, lain-lain PAD yang sah Rp. 680.000.000 terealisasi sebesar Rp. 680.000.000 atau 100%, dan realisasi penerimaan lain – lain (sewa lahan ATM NTB) sebesar Rp.8.250.000.

Mataram, 2025

Kepala BPSDMD

Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. A. SHARI, SH., MH.
NIP. 19661231 199003 1 100

FORMULIR E.54.2
EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA
BPSDM DAERAH PROVINSI NTB
PERIODE PELAKSANAAN 2024-2026

Sasaran RPD Prov NTB 2024 - 2026	Indikator Kinerja	Tahun		
		2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan	Nilai SAKIP	A	A	A
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal daerah	Sedang	Sedang	Tinggi

SASARAN PERANGKAT DAERAH	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA 2023	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun				Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						UNIT PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		2024		2026	2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							22.405.456.680		19.605.456.680		20.705.456.680		20.910.082.099				93%					KEPALA BADAN
Tingkat Kualitas Pelayanan Urusan Penunjang Daerah Provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	100	A		A		A		A		BB			BB							SERETARIS
Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Retribusi dan LLPAD pada BPSDMD Provinsi NTB		Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	0	>15	%	7-10	17.722.983.553	10-15	17.077.443.225	>15	17.418.992.089	6.8	18.940.649.756		97%	107%						SERETARIS
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	39	36	Dokumen	37	267.113.000	36	249.500.000	36	263.000.000	34	469.142.163		92%	176%						SERETARIS
Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2	dokumen	3	115.000.000	2	120.000.000	2	122.000.000	2	195.191.250		67%	170%						SERETARIS
Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	dokumen	1	60.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	63.923.950		100%	107%						SERETARIS
Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	dokumen	1	59.113.000	1	50.000.000	1	54.000.000	1	34.837.000		100%	59%						SERETARIS

SASARAN PERANGKAT DAERAH	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA 2023	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun				Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						UNIT PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		2024		2026	2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tersusunnya laporan capaian dan koordinasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	26	Laporan	26	10.000.000	26	9.500.000	26	11.000.000	26	19.825.000		100%	198%					SECRETARIS	
Tersusunnya laporan evaluasi Kinerja PD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	6	Laporan	6	23.000.000	6	20.000.000	6	21.000.000	4	155.364.963		67%	675%					SECRETARIS	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	31	31	Dok	31	13.707.149.901	31	13.614.105.965	31	13.789.000.000	31	14.892.918.845		100%	109%					KASUBAG KEUANGAN	
			88	115	org	115		115		115		86			75%					KASUBAG KEUANGAN		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	115	Orang	115	13.497.145.901	115	13.424.105.965	115	13.604.000.000	86	14.696.018.148		75%	109%			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Dokumen	12	153.309.800	12	140.000.000	12	135.000.000	12	124.452.697		100%	81%					KASUBAG KEUANGAN	
Meningkatnya tranparansi dan Akuntabilitas Keuangan PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun SKPD	1	1	Laporan	1	33.195.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	20.195.000		100%	61%					KASUBAG KEUANGAN	
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/TRW/Semesteran PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Laporan	18	23.499.200	18	20.000.000	18	20.000.000	18	52.253.000		100%	222%					KASUBAG KEUANGAN	
Meningkatnya kualitas pengeloan Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah	1	4	Laporan	4	41.872.800	4	41.872.800	4	45.000.000	4	58.351.375		100%	139%					KASUBAG KEUANGAN	
Meningkatnya kualitas Penatausahaan BMD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4	Laporan	4	41.872.800	4	41.872.800	4	45.000.000	4	58.351.375		100%	139%					KASUBAG KEUANGAN	
Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana Disiplin Pegawai	0	1	unit	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	0	0		0%	0%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1	unit	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	0	0		0%	0%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	102	83	Paket	83	503.997.950	83	433.000.000	83	437.000.000	90	438.121.519		108%	87%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
			96	54	dok/laporan	54		47		52		47			87%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN		

SASARAN PERANGKAT DAERAH	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA 2023	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun				Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						UNIT PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		2024		2026	2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketersediaan Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	Paket	10	86.031.000	10	80.000.000	10	80.000.000	17	71.418.225		170%	83%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	70	Paket	70	84.675.950	70	75.000.000	70	75.000.000	70	58.257.140		100%	69%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	1	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	2.304.000		100%	58%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	Paket	2	17.196.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	5.250.000		100%	31%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Informasi Bagi ASN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2	Dokumen	2	15.660.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	13.680.000		100%	87%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	52	Laporan	52	296.435.000	45	245.000.000	50	249.000.000	45	287.212.154		87%	97%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	22	105	Unit	754	212.833.173	53	73.283.336	107	168.310.965	18	265.150.000		2%	125%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas Jabatan;	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	-	Unit	3	74.114.000	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0		0%	0%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5	Paket	610	-	1	3.283.336	5	20.000.000	0	0		0%	0%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Mesin PD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	100	Unit	141	138.719.173	50	10.000.000	100	68.310.965	18	265.150.000		13%	191%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	Unit	-	-	1	30.000.000	1	50.000.000		0		0%	0%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	17	100	Persen	100	2.204.786.729	100	1.927.581.124	100	1.927.581.124	80	1.921.082.652		80%	87%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2	2	Laporan	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000	2	1.000.000		100%	37%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	
Meningkatnya Ketersediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	12	Laporan	12	625.882.929	12	348.677.324	12	348.677.324	12	565.883.652		100%	90%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	

SASARAN PERANGKAT DAERAH	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA 2023	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun				Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						UNIT PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		2024		2026	2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	12	1.576.203.800	12	1.576.203.800	12	1.576.203.800	12	1.354.199.000			100%	86%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	192	490	Unit	479	660.230.000	437	613.100.000	452	664.100.000	143	895.883.202			30%	136%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
Meningkatnya Kualitas Kendaraan Perorangan/ Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	21	Unit	21	153.100.000	21	153.100.000	21	153.100.000	18	110.453.343			86%	72%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
Meningkatnya Kualitas kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	Unit	6	90.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	5	76.632.709			83%	85%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
Meningkarnya kualitas peralatan dan mesin PD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159	448	Unit	441	167.130.000	400	150.000.000	412	156.000.000	115	175.223.000			26%	105%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	15	Unit	11	250.000.000	10	220.000.000	13	265.000.000	5	533.574.150			45%	213%					KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
Meningkatnya ASN yang bersertifikat kompetensi Manajerial	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	8	0.10	Persen	10	4.682.473.127	10	2.528.013.455	10	3.286.464.591	5	1.934.657.343		50%	41%					KABID PKMF	
Meningkatnya ASN yang bersertifikat kompetensi Fungsional		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	11	0.02		2		2		2		2,5			125%					KABID PKMF		
Meningkatnya ASN yang bersertifikat kompetensi teknis		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	7	0.20		17		18		20		19,4			114%					KABID PKT		
Meningkatnya ASN yang Tersertifikasi		Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0,2	32		29		30		32		2			7%					KABID SKPK		
Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi teknis	Pengembangan Kompetensi Tekhnis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	110	120	orang	180	523.042.000	120	392.504.000	120	452.880.000	5.442	249.171.190		3023%	48%					KABID PKT	
		Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis	10	7	dokumen	7		7		7		5			71%					KABID PKT		

SASARAN PERANGKAT DAERAH	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA 2023	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun				Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						UNIT PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		2024		2026	2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tersusunnya kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	4	2	dokumen	2	38.393.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	98.382.220		100%	256%					KABID PKT	
Tersusunnya standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi teknis	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	4	2	dokumen	2	38.393.000	2	40.000.000	2	41.000.000	2	44.456.920		100%	116%					KABID PKT	
Terselenggarannya pengembangan kompetensi teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	110	120	Orang	180	446.256.000	120	287.504.000	120	366.880.000	5.435	106.332.050		3019%	24%					KABID PKT	
Tersusunnya dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan	2	3	Dokumen	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	8	34.775.000		267%	139%					KABID EVAPOL	
Meningkatnya kualitas pengembangan kelembagaan sumber belajar dan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional serta sertifikasi kompetensi	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	88	618	orang	588		377		618		40		7%							KABID PKMF	
		Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	-	200	Orang	200	4.159.431.127	200	2.135.509.455	200	2.833.584.591	76	1.685.486.153		38%	41%					KABID SKPK	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	35	43	Dokumen	29		36		43		52		179%							KABID PKMF,KABID PKT SKP,KABID EVAPOL	
Tersusunnya kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembang Kompetensi,	2	2	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	3	179.444.080		150%	718%					KABID PKMF	

SASARAN PERANGKAT DAERAH	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA 2023	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun				Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						UNIT PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		2024		2026	2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tersusunnya dokumen pengelola LSP-PDN	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	4	3	Dokumen	3	59.170.400	3	50.000.000	3	55.000.000	8	33.690.000		267%	57%					KABID SKPK	
Terlaksananya sertifikasi kompetensi ASN	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	0	200	Orang	200	125.000.000	200	120.000.000	200	122.613.746	76	33.850.000		38%	27%					KABID SKPK	
Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan dan sumber belajar	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	6	3	Laporan	3	409.574.947	3	250.000.000	3	300.000.000	3	424.732.455		100%	104%					KABID SKPK	
Tersusunnya dokumen kerjasama antar lembaga	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	25	33	Dokumen	18	88.316.100	27	50.000.000	33	70.000.000	35	271.496.878		194%	307%					KABID EVAPOL	
Tersusunnya standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatn Fungsional yang Disusun	2	2	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	19.499.400		100%	78%					KABID PKMF	
Terselenggaranya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	88	618	Orang	588	3.327.369.680	377	1.565.509.455	618	2.150.970.845,00	40	688.203.340		7%	21%					KABID PKMF	
Tersusunnya dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Jabatan.	2	3	Dokumen	4	100.000.000	2	50.000.000	3	85.000.000	4	34.570.000		100%	35%					KABID EVAPOL	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

-Menyesuaikan kegiatan dengan anggaran sehingga capaian kinerja yang ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai,

-Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan bekerjasama/sharing anggaran dengan Lembaga/Kementrian,

-Membuat inovasi non anggaran dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi melalui webinar series/podcast yang diadakan setiap hari rabu untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalisme ASN.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

- Belum terakomodirnya kebutuhan Pengembangan Kompetesi bagi ASN Pemprov NTB yang menunjang peningkatan kinerja sesuai dengan jabatan masing2

-Tidak semua ASN menganggap pengembangan kompetensi penting untuk pengembangan kariernya

- Pengembangan Kompotensi yang diselenggarakan diluar BPSDM Provinsi NTB belum sepenuhnya tercatat di BPSDMD NTB

- Penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN belum didasarkan kepada Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)

-Data Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB yang telah terinput pada aplikasi SIMADU masih banyak yang belum memenuhi JP wajib yaitu minimal 20 JP untuk PNS dan Maksimal 24 JP untuk PPPK sehingga perhitung Indeks Profesionalisme ASN (IPA) di Aplikasi SIASN BKN masih belum maksimal.

-Masih Minimnya Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN selama ini baik bagi ASN yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berdampak pada terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi

Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran/ SPD yang tersedia,

:	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Renja PD Tahun Berikutnya	- Membuat inovasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB melalui pola kerjasama dengan Kementrian atau lembaga terkait tanpa menggunakan anggaran APBD.
	;-Menyusun Regulasi tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP bagi PNS dan Maksimal 24 JP bagi PPPK dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan ASN yang kompeten dan profesional sesuai bidang tugasnya.
	- Merancang Regulasi mengenai hasil pelaksanaan Pegembangan Kompetensi yang berdampak bagi karir ASN
	-Merancang Regulasi terkait pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Satu Pintu
	-Merancang Skema Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan berkoordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi Provinsi NTB.
-Mendorong diterapkan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (Corporate University) sesuai amanat Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 dengan nama " NTB Corporate University" sehingga dapat memenuhi jumlah JP wajib ASN per tahun sesuai Amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN serta melaksanakan monitoring terhadap inputan Data Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi NTB pada Aplikasi SIMADU yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi SIASN BKN	
-Melaksanakan Program "RABU CERDAS" (Webinar dan Podcast) untuk memudahkan ASN Provinsi NTB melakukan Pengembangan Kompetensi melalui media Daring	

FORMULIR E.54.2
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
					20.705.456.680		19.306.409.130		21.474.103.339		20.910.082.099		97,37	-	40.216.491.229	0	194
Tingkat kualitas pelayanan urusan penunjang daerah Provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD		A	17.418.992.089	BB	16.873.581.702	BB	19.604.103.339	BB	18.940.649.756	BB	96,62	BB	35.814.231.458	0	206
Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Retribusi dan LLPAD pada BPSDMD Provinsi NTB		Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	%	>15		-		7		6,8		97		7	-	0	0
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Dokumen	36	263.000.000	100	416.037.117	37	380.229.350	68	469.142.163	184	123,38	168	885.179.280	467	337
Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	122.000.000	4	241.820.000	3	130.649.450	2	195.191.250	67	149,40	6	437.011.250	300	358
Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	55.000.000	3	27.757.700	1	54.891.950	1	63.923.950	100	116,45	4	91.681.650	400	167

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	54.000.000	4	53.988.000	1	38.294.000	1	34.837.000	100	90,97	5	88.825.000	500	164
Tersusunnya laporan capaian dan koordinasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	26	11.000.000	16	18.258.000	26	31.169.000	26	19.825.000	100	63,60	42	38.083.000	162	346
Tersusunnya laporan evaluasi Kinerja PD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	21.000.000	12	74.213.417	6	125.224.950	6	155.364.963	100	124,07	18	229.578.380	300	1093
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Dok	31	13.789.000.000	31	12.684.319.836	31	15.290.894.415	31	14.892.918.845	100	97,40	62	27.577.238.681	200	200
			org	115		88		88		86		98		174	-	151	0
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	13.604.000.000	88	12.458.475.910	88	15.081.090.415	86	14.696.018.148	98	97,45	174	27.154.494.058	151	200
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	135.000.000	12	147.612.726	12	163.925.000	12	124.452.697	100	75,92	24	272.065.423	200	202
Meningkatnya tranparansi dan Akuntabilitas Keuangan PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun SKPD	Laporan	1	30.000.000	1	38.020.000	1	20.695.000	1	20.195.000	100	97,58	2	58.215.000	200	194

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/TRW/Semesteran PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	20.000.000	18	40.211.200	18	25.184.000	18	52.253.000	100	207,48	36	92.464.200	200	462
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	4	45.000.000	1	43.907.800	4	47.911.375	4	58.351.375	0	121,79	5	102.259.175	125	227
'Meningkatnya kualitas Penatausahaan BMD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	45.000.000	1	43.907.800	4	47.911.375	4	58.351.375	0	121,79	5	102.259.175	125	227
Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	125.000.000	-	-	0	-	0	-	0	0,00	-	-	0	0
Meningkatnya kualitas peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	125.000.000	-	-	0	0	0	-	0	0,00	-	-	0	0
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	Paket	83	408.000.000	102	575.755.201	83	389.806.365	90	438.121.519	108	112,39	192	1.013.876.720	231	248
			dok/laporan	54		96		54		62		115		158	-	293	0
Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketersediaan instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	80.000.000	10	72.298.450	10	71.639.225	17	71.418.225	170	99,69	27	143.716.675	270	180
Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	70	75.000.000	70	68.544.450	70	48.257.140	70	58.257.140	100	120,72	140	126.801.590	200	169

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	20	2.502.000	1	4.000.000	1	2.304.000	100	57,60	21	4.806.000	2100	120
Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	2	8.327.500	2	8.000.000	2	5.250.000	100	65,63	4	13.577.500	200	91
Meningkatnya Informasi Bagi ASN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	14.000.000	1	13.680.000	2	15.660.000	2	13.680.000	100	87,36	3	27.360.000	150	195
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	220.000.000	95	410.402.801	52	242.250.000	60	287.212.154	115	118,56	155	697.614.955	298	317
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	106	168.310.965	22	231.628.000	20	408.382.700	18	265.150.000	90	64,93	40	496.778.000	38	295
Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas Jabatan;	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-	2	53.228.000	0	560.000	0	-	0	0,00	2	53.228.000	200	0
Meningkatnya Ketersediaan Mebel PD	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	68.310.965	-	-	0	-	0	-	0	0,00	-	-	0	0
Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Mesin PD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	100.000.000	20	178.400.000	20	407.822.700	18	265.150.000	90	0,00	38	443.550.000	38	443,55
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0,00	-	-	0	0

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	1.927.581.124	17	1.990.811.245	100	2.083.130.834	80	1.921.082.652	80	92,22	97	3.911.893.897	97	203
Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.700.000	2	500.000	2	1.500.000	2	1.000.000	100	66,67	4	1.500.000	200	56
Meningkatnya Ketersediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	348.677.324	3	584.611.245	12	514.722.034	12	565.883.652	100	109,94	15	1.150.494.897	125	330
Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.576.203.800	12	1.405.700.000	12	1.566.908.800	12	1.354.199.000	100	86,42	24	2.759.899.000	200	175
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	490	693.100.000	192	931.122.503	82	1.003.748.300	143	895.883.202	174	89,25	335	1.827.005.705	68	264
Meningkatnya Kualitas Kendaraan Perorangan/ Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	153.100.000	18	125.012.034	21	160.720.000	18	110.453.343	86	68,72	36	235.465.377	171	154
Meningkatnya Kualitas kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	90.000.000	5	69.159.247	5	90.000.000	5	76.632.709	100	85,15	10	145.791.956	167	162
Meningkatnya kualitas peralatan dan mesin PD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	448	150.000.000	159	277.198.972	50	56.830.000	115	175.223.000	230	308,33	274	452.421.972	61	302

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	300.000.000	10	459.752.250	6	696.198.300	5	533.574.150	83	76,64	15	993.326.400	100	331
Meningkatnya ASN Yang Bersertifikat Kompetensi Manajrial	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	Persen	10	3.286.464.591	8	2.432.827.428	10	1.870.000.000	5	1.969.432.343	50	105,32	13	4.402.259.771	130	134
Meningkatnya ASN Yang Bersertifikat Kompetensi fungsional		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional		2		11		2		2,5		125		14		-	
Meningkatnya ASN Yang Bersertifikat Kompetensi Teknis		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis		20		7		17		19,4		114		26		132	
Meningkatnya ASN Yang Tersertifikasi		Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	Persen	0,32		0,002		0,29		0,42		145		0		132	
Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi teknis	Pengembangan Kompetensi Tekhnis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	orang	540	452.880.000	110	295.093.584	120	285.000.000	5.420	283.946.190	4517	99,63	5.530	579.039.774	1024	128
		Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis	dokumen	7		10		6		12		200		22	-	314	0

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersusunnya Kebijakan Tekhnis, pelaksanaan pengembangan Kompetensi Tekhnis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	2	45.000.000	4	86.265.724	2	75.000.000	2	98.382.220	100	131,18	6	184.647.944	300	410
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	2	41.000.000	4	30.244.300	2	44.500.000	2	44.456.920	100	99,90	6	74.701.220	300	182
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	540	341.880.000	110	153.982.300	120	130.500.000	5.435	106.332.050	4529	81,48	5.545	260.314.350	1027	76

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersusunnya dokumen evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi Tekhnis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi.	Dokumen	3	25.000.000	2	24.601.260	2	35.000.000	8	34.775.000	400	99,36	10	59.376.260	333,33333	238
Meningkatnya kualitas pengembangan kelembagaan sumber belajar dan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional serta sertifikasi kompetensi	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang	245	2.833.584.591	-	2.137.733.844	20	1.585.000.000	76	1.685.486.153	380	106,34	76	3.823.219.997	31	135
		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	Orang	1.583		88		40		m		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	Dokumen	46		41		33		56		170		97		211	
Tersusunnya Kebijakan Tekhnis pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembang Kompetensi.	Dokumen	2	25.000.000	2	-	3	180.000.000	3	179.444.080	100	99,69	5	179.444.080	250	718

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersusunnya dokumen pengelolaan LSP-PDN	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	3	55.000.000	4	13.713.200	3	35.000.000	8	33.690.000	267	96,26	12	47.403.200	400	86
Terlaksanannya Sertikasi Kompetensi ASN	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	Orang	245	122.613.746	-	79.924.220	20	35.000.000	76	33.850.000	380	96,71	76	113.774.220	31	93
Terlaksanannya Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembangan dan Sumber Belajar	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	3	300.000.000	6	528.789.353	3	427.500.000	4	424.732.455	133	99,35	10	953.521.808	333,33333	318
Tersusunnya Dokumen Kerjasama Antar Lembaga	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	33	70.000.000	25	111.383.916	18	145.000.000	35	271.496.878	194	187,24	60	382.880.794	182	547
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatn Fungsional yang Disusun	Dokumen	2	25.000.000	2	-	2	20.000.000	2	19.499.400	100	97,50	4	19.499.400	200	78

SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		TARGET KINERJA dan ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN RENJA Tahun 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA dan REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Orang	1.583	2.150.970.845	88	1.282.712.535	40	707.500.000	m	688.203.340	#VALUE!	97,27	#VALUE!	1.970.915.875	#VALUE!	92
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabtan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Jabatan.	Dokumen	3	85.000.000	2	121.210.620	4	35.000.000	4	34.570.000	100	98,77	6	155.780.620	200	183
RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM																	
RATA-RATA CAPAIAN KEGIATAN																	
RATA-RATA CAPAIAN SUB KEGIATAN																	

**FAKTOR PENDORONG
KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA :**

- Menyesuaikan kegiatan dengan anggaran sehingga capaian kinerja yang ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai,
- Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan bekerjasama/sharing anggaran dengan Lembaga/Kementrian,
- Membuat inovasi non anggaran dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi melalui webinar series/podcast yang diadakan setiap hari rabu untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalisme ASN.'

**FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN
KINERJA**

- Belum terakomodirnya kebutuhan Pengembangan Kompetesi bagi ASN Pemprov NTB yang menunjang peningkatan kinerja sesuai dengan jabatan masing2
- Tidak semua ASN menganggap pengembangan kompetensi penting untuk pengembangan kariernya
- Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan diluar BPSDM Provinsi NTB belum sepenuhnya tercatat di BPSDMD NTB
- Penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN belum didasarkan kepada Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)
- Data Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB yang telah terinput pada aplikasi SIMADU masih banyak yang belum memenuhi JP wajib yaitu minimal 20 JP untuk PNS dan Maksimal 24 JP untuk PPPK sehingga perhitungan Indeks Profesionalisme ASN (IPA) di Aplikasi SIASN BKN masih belum maksimal.
- Masih Minimnya Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN selama ini baik bagi ASN yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berdampak pada terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi

**TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
DALAM PERUBAHAN RENJA 2024 :**

- Menyusun Regulasi tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP bagi PNS dan Maksimal 24 JP bagi PPPK dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan ASN yang kompeten dan profesional sesuai bidang tugasnya.
- Merancang Regulasi mengenai hasil pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang berdampak bagi karir ASN
- Merancang Regulasi terkait pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Satu Pintu
- Merancang Skema Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan berkoordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi Provinsi NTB.
- Mendorong diterapkan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (Corporate University) sesuai amanat Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 dengan nama “ NTB Corporate University” sehingga dapat memenuhi jumlah JP wajib ASN per tahun sesuai Amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN serta melaksanakan monitoring terhadap inputan Data Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi NTB pada Aplikasi SIMADU yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi SIASN BKN
- '-Melaksanakan Program "RABU CERDAS" (Webinar dan Podcast) untuk memudahkan ASN Provinsi NTB melakukan Pengembangan Kompetensi melalui media Daring

KEPALA-BPSDM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NTB



PARL SH..MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 198603 1 105

Lampiran Laporan I.3

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PELAKSANAAN URUSAN TAHUN 2024

NAMA OPD: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NTB

NAMA PROGRAM PRIORITAS/	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	Permasalahan /Kendala	KET
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN			
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Memberikan diklat secara berkala sesuai dengan kebutuhan analisis kebutuhan daerah, sosialisasi dan kemudahan izin bagi ASN untuk mengikuti diklat / workshop/seminar, lokakarya dan sejenisnya yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat kepesertaan	Dimensi Kompetensi	29%	2.041.500.000	26,99%	1.969.432.343	93	96,47	BPSDM Daerah Provinsi NTB	Belum terakomodirnya kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN Pemprov NTB yang menunjang peningkatan kinerja sesuai dengan jabatan masing2	
										Tidak semua ASN menganggap pengembangan kompetensi penting untuk pengembangan kariernya	
										Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan diluar BPSDM Provinsi NTB belum sepenuhnya tercatat di BPSDMD NTB	
										Penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN belum didasarkan kepada Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)	
										Data Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB yang telah terinput pada aplikasi SIMADU masih banyak yang belum memenuhi JP wajib yaitu minimal 20 JP untuk PNS dan Maksimal 24 JP untuk PPPK sehingga perhitungan Indeks Profesionalisme ASN (IPA) di Aplikasi SIASN BKN masih belum maksimal.	
										Masih Minimnya Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN selama ini baik bagi ASN yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berdampak pada terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi	

KEPALA BPSDM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NTB



ARI, SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 198603 1 105

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN 2024**

JENIS DAK :

[illegible]

KEPALA BPSDM DAERAH
PROVINSI NTB



ARI, SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 198603 1 105

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCHT)
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA OPD PELAKSANA: BPSDM DAERAH PROVINSI NTB

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KELUARAN	SATUAN	TARGET KINERJA/KELUARAN	ALOKASI PAGU	REALISASI		LOKASI PELAKSANAAN	KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
							KINERJA/KELUARAN	PAGU			

NIHIL

KEPALA BPSDM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NTB



ASHARI, SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 198603 1 105

LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA OPD PELAKSANA: BPSDM DAERAH PROVINSI NTB

NO	NAMA BIDANG/SUB BIDANG SPM	JENIS PELAYANAN	BENTUK KEGIATAN YANG DILAKUKAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN SPM		REALISASI PENCAPAIAN SPM	
							VOLUME	%	VOLUME	%

NIHIL

KEPALA BPSDM DAERAH
Pemerintah Provinsi NTB



B. H. ASHARI, SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 198603 1 105

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DANA DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA K/L PEMBERI DEKON/TP	DASAR PELAKSANAAN PELIMPAHAN/PENUGASAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN	SATUAN	TARGET KINERJA/ KELUARAN	ALOKASI PAGU	REALISASI		LOKASI PELAKSANAAN	KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
								KINERJA/ KELUARAN	PAGU			

NIHIL

KEPALA BPSDM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NTB

Drs. H. H. SHARI, SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 198603 1 105